LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SETDA PROVINSI NUSA TENGGAR TIMUR

UKPBJ PROVINSI NTT *Center of Excellence*

DAFTAR ISI

IKHTISAR ESEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B Maksud dan Tujuan 2

C Gambaran Umum 2

D Dasar Hukum 11

E Sistematika Penulisan 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15

A Rencana Strategis Organisasi 15

B Rencana Kerja Tahun 2020 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

A Akuntabilitas Kinerja 19

B Akuntabilitas Keuangan 28

BAB IV PENUTUP 31

LAMPIRAN 32

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media informasi yang wajib dibuat oleh setiap Perangkat Daerah untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berkenaan dengan itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai salah satu Satuan Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2020.

Dalam LKIP Tahun 2020 ini, dipaparkan secara runtut dan detail kinerja yang dicapai Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, diawali dari uraian substantif dokumen perencanaan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur (*RENSTRA, RKT* dan *Penetapan Kinerja*) hingga deskripsi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dicapai, baik dalam hal *capaian kinerja output, capaian kinerja outcomes* maupun *akuntabilitas keuangan.*

Visi/misi Kepala Daerah berhubungan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT adalah pada Misi ke 5 (lima) yaitu : "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik". Apabila misi ke 5 tersebut diturunkan ke dalam Tujuan RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang berhubungan dengan pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT adalah **"***Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Korupsi (KKN)***"**. Berdasarkan tujuan tersebut, Sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang terkait dengan pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT adalah **"***Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif***"**.

Secara umum sasaran kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut : (1). Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah paket pengadaan barang/jasa di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan (2). Terselenggara pengendalian dan monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020.

Kupang, Desember 2020

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SIPRIANUS K. KELEN, S.Sos, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631119 198903 1 009

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah laporan kinerja tahunan tentang pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibaiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud yang mana merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban oleh sebuah organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pemcapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023. Secara umum, pencapaian kinerja tahun 2020 sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggung jawaban kepada *stakeholders* serta sebagai data dan informasi bagi peningkatan kinerja organisasi di tahun yang akan datang.

Kupang, Januari 2021

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa,

SIPRIANUS K. KELEN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196311191989031009

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan kepada publik dan Pemerintah tingkat atas tentang segala keberhasilan dan atau kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan tugas. Sebagai salah satu prinsip tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance*), akuntabilitas memegang peran strategis untuk menjamin terwujudnya keseimbangan peran baik Pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, Akuntabilitas Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk pelaporan yang komprehensif tentang kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pernyataan-pernyataan kinerja terukur yang dilaporkan merupakan hasil analisis terhadap target kinerja yang ditetapkan dan capaian kinerja yang dihasilkan, dengan tetap mengacu pada lima indikator kinerja yang meliputi *input, output, outcomes, benefit* dan *impact*.

Secara faktual diakui bahwa melaporkan capaian kinerja dalam lima indikator sebagaimana tersebut di atas masih menemui banyak kendala. Salah satu kendala yang dominan adalah lemahnya sistem pengadministrasian data kinerja Instansi Pemerintah dalam suatu *time series* tertentu, sehingga capaian kinerja yang dilaporkan pada umumnya hanya sampai pada *output* dan *outcomes* saja. Memang dalam kondisi tertentu, capaian kinerja suatu kegiatan dapat diperkenankan dilaporkan hanya sampai pada *output* dan *outcomes* saja, karena dengan mempertimbangkan *sifat dan ruang lingkup pelaksanaannya*, dibutuhkan jangka waktu pelaksanaan tertentu untuk menghitung *benefit* dan *impact*nya. Akan tetapi manakala setiap Instansi Pemerintah berpegang pada komitmen untuk melaporkan capaian kinerja dalam indikator *input, output, outcomes, benefit* dan *impact*, maka ke depan perlu dibangun suatu sistem evaluasi kinerja Instansi Pemerintah yang komprehensif dan terintegrasi sehingga data kinerja yang dilaporkan lebih valid dan obyektif.

· Salah satu bentuk pelaporan hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP ini, disajikan berbagai informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi Biro Pengadaan Barang/Jasadalam rumusan target dan capaian kinerja terukur.

Sajian informasi terukur ini diharapkan dapat memudahkan setiap pihak yang berkepentingan untuk membaca, memahami dan memberikan tanggapan/ input dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah di masa mendatang.

Diharapkan LKIP ini selain dapat menjadi bahan evaluasi dan alat ukur untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan TUPOKSI pada masa mendatang, juga sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan oleh Pimpinan dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya LKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT tahun 2020 adalah :

1. Maksud

   Untuk melaporkan hasil kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2020, termasuk permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang ditempuh.

2. Tujuan

   a. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada Dokumen RENSTRA, RKT dan PK Tahun 2020.

   b. Menganalisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT untuk selanjutnya dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan kinerja tahun anggaran berikutnya.

C. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan *membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengadaan barang/jasa yang meliputi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan pengadaan barang/jasa serta pembinaan advokasi pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan.*

Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai unsur staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan struktur organisasi yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari tiga Sub Bagian serta Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia (POKJA), dengan perincian sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 11 (sebelas) Sub Bagian, masing-masing dengan rumusan uraian tugas jabatan sebagai berikut :

1. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

Tugas Bagian Pengelolaan LPSE adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan LPSE yang meliputi ketatausahaan, pengelolaan dan pelayanan sistem pengadaan secara elektronik berdasarkan ketentuan dan prosedur berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengelolaan LPSE mempunyai fungsi :

1. Merencanakan operasional Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik berdasarkan rencana kerja biro dan sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

3. Memberi petunjuk dan menyempurnakan konsep petunjuk teknis perencanaan program/kegiatan, penatausahaan keuangan, perlengkapan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas;.
4. Merencanakan operasional penyusunan rencana kerja Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, meliputi penatausahaan, pengelolaan dan layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, program kerja dan evaluasi serta pengembangan SDM yang berorientasi pada kebutuhan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Merencanakan operasional penyusunan rencana kinerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro agar tersusun dan terakomodirnya Rencana Kerja Tahunan;
6. Merencanakan operasional pengembangan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Merencanakan operasional perumusan dan penetapan laporan pelaksanaan Kode Etik, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Kinerja Biro sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Biro;
8. Menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mengetahui capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan;
9. Melaksanakan pembinaan disiplin kinerja terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, integritas dan bermoral;
10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan secara berkala kepada pimpinan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan sebagai bahan masukan kedepannya;
11. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pengelolaan LPSE dibantu 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
3. Sub Bagian Pengelolaan Informasi PBJ

2. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ);

Tugas Bagian Pengelolaan PBJ adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengelolaan PBJ mempunyai fungsi :

1. Merencanakan langkah-langkah operasionalisasi Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan rencana kerja biro sesuai sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Menyusun dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBD maupun APBN dan sumber pembiayaan lainnya, dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah.
5. Merumuskan alternatif pemecahan masalah dan memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai bahan masukan kepada pimpinan.
6. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen pendukung usulan paket pengadaan dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga penanggungjawab pekerjaan dalam rangka validasi dokumen untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

7. Mengusulkan penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kompetensi dan jenis/sifat pekerjaan yang akan dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa.
8. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan secara berkala/triwulan terhadap pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang sebagian dan/atau seluruh dananya bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada pimpinan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pengelolaan PBJ dibantu 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Pengelola Strategi PBJ;
2. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan PBJ;
3. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi;

3. Kepala Bagian Pembinaan, Advokasi PBJ dan Administrasi Pembangunan;

Tugas Bagian Pembinaan, Advokasi PBJ dan Administrasi Pembangunan adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi Bagian Pembinaan, Advokasi PBJ dan Administrasi Pembangunan meliputi pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia, advokasi penanganan masalah, evaluasi dan pelaporan APBD Provinsi, APBN, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pembinaan, Advokasi PBJ dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

1. Merencanakan operasional kegiatan Bagian Pembinaan, Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan berdasarkan langkah-langkah operasional dan hasil evaluasi tahun sebelumya serta sumber data yang ada untuk kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan aturan yang berlaku agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.

3. Melakukan advokasi, penanganan masalah, pengaduan dan sanggah banding agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
4. Merumuskan kebijakan, standar, norma, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah;
5. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah/dokumen yang bekaitan dengan penyelesaian permasalahan, sanggahan dan pengaduan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bawahan.
6. Menyelenggarakan kegiatan mentoring dan/atau sistering (pembinaan dan pendampingan) terhadap Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota yang membidangi pengadaan barang/jasa.
7. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyetaraan dan/atau penyamaan persepsi terkait permasalahan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa.
8. Merumuskan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan sanggahan, pengaduan dan masalah pengadaan barang/jasa.
9. Menyusun rencana pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi serta melakukan konsultasi dan koordinasi kegiatan pembinaan jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Merumuskan kebijakan pembinaan jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjadi acuan pengadaan barang/jasa di daerah.
11. Melakukan pembinaan dan evaluasi jasa konstruksi lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
12. Melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian dan/atau seluruh pembiayaannya bersumber dari dana APBN, APBD dan DAK untuk pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Mengendalikan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi pembangunan provinsi berdasarkan prosedur yang berlaku agar tugas berjalan dengan baik dan lancar.

14. Menyusun dan/atau mengoreksi olahan data dan informasi pelaksanaan program Pembangunan Provinsi dan tugas pembantuan Provinsi yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang dibiayai dari dana APBN, APBD dan DAK berdasarkan rekapan data dan informasi agar tersedia data yang dibutuhkan.
15. Mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang dibiayai dari dana APBN, APBD dan DAK berdasarkan rekapan data dan informasi untuk mengetahui tingkat kegagalan dan permasalahan yang dihadapi.
16. Melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan pimpinan.
17. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pembinaan, Advokasi PBJ dan Administrasi Pembangunan, yaitu

1. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan APBD Provinsi;
3. Kepala Sub Bagian Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan APBN.

Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa
SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur

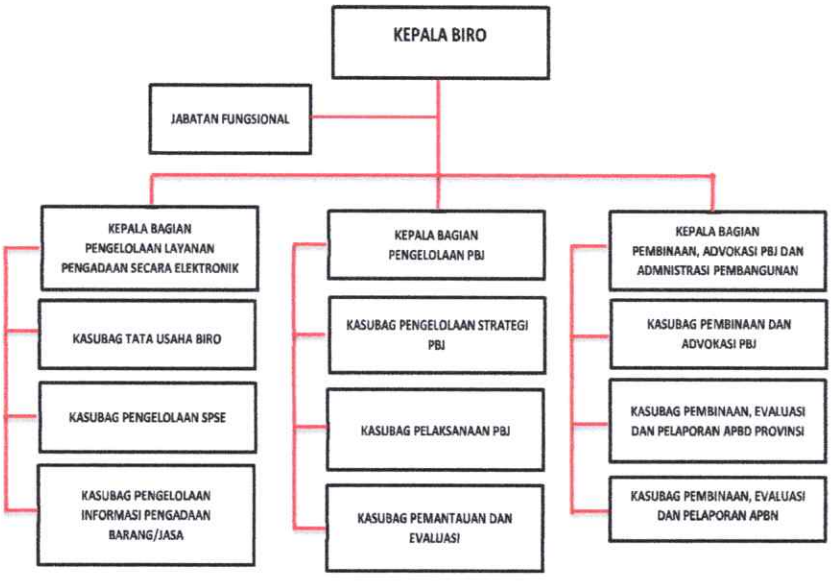

2. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan bulan Desember 2020 didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 56 Orang yang terdiri dari 49 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 7 Orang dengan Perjanjian Kerja, seperti terlihat pada tabel dibawah ini Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Kepegawaian

No.	Jabatan	L	P	Jumlah
I.	JABATAN STRUKTURAL			
	1. Kepala Biro (Eselon II-b)	1	-	1
	2. Kepala Bagian (Eseleon IIIa)	3	-	3
	3. Kepala Sub Bagian (Eselon IV-a)	5	4	9
II.	JABATAN FUNGSIONAL	-	2	2
III.	PELAKSANA	27	7	34
	Jumlah	36	13	49

Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1.	Strata 3 (S-3)	-	-	-	0
2.	Strata 2 (S-2)	10	1	11	22,4
3.	Strata 1 (S-1)	19	5	24	49,0
4.	Diploma IV	1	1	2	4,1
5.	Diploma 3	1	1	2	4,1
6.	SLTA/SMK/KPAA	5	5	10	20,4
7.	SLTP	-	-	-	0
8.	SD	-	-	-	0
	Jumlah	36	13	49	100

Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan	L	P	Jumlah	%
Golongan IV / e	-	-	-	
Pembina Utama Madya – IV/d	-	-	-	
Pembina Utama Muda - IV/c	1	-	1	
Pembina Tingkat I - IV/b	3	-	3	
Pembina - IV/a	3	1	4	
Jumlah	7	1	8	16,3
Golongan III				
Penata Tingkat I - III/d	7	4	11	
Penata - III/c	10	4	14	
Penata Muda Tingkat I - III/b	5	3	8	
Penata Muda - III/a	2	1	3	
Jumlah	24	12	36	73,5
Golongan II				
Pengatur Tingkat I - II/d	1	1	2	
Pengatur - II/c	2	-	2	
Pengatur Muda Tingkat I - II/b	1	-	1	

Pengatur Muda - II/a	-	-		
Jumlah	4	1	5	10,2
Total	**35**	**14**	**49**	**100**

Selain tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Biro Pengadaan Barang/JasaSETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terdapat Tenaga Kontrak /Honorer yang dibiaya oleh APBD Provinsi NTT sebanyak 7 orang.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pengadaan Barang/JasaSekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan pada :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. PerMen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pengadaan Barang/JasaSETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, serta sistematika penyusunan LKIP Biro Pengadaan Barang/JasaSETDA Provinsi NTT tahun 2018.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP.

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan disusunnya LKIP serta manfaat yang diharapkan dari penyusunan LKIP tersebut.

C. Gambaran Umum

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT tahun 2020 mengenai struktur organisasi dan tata kerja serta sumber daya aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT.

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan – peraturan yang mendasari penyusunan LKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT tahun 2020.

E. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai RENSTRA Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020

2. **Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

   1. **Tujuan**

      Menjelaskan mengenai definisi/makna dari tujuan dan menguraikan seluruh tujuan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT.

   2. **Sasaran**

      Menjelaskan mengenai definisi/makna dari sasaran dan menguraikan seluruh sasaran yang ditetapkan pada masing – masing tujuan yang hendak dicapai Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT.

   3. **Strategi**

      Menguraikan strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

   4. **Kebijakan**

      Menguraikan kebijakan dan program-program pada masing-masing tujuan dan misi yang telah ditetapkan.

2. **Penetapan Kinerja Tahun 2019**

   Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing-masing indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini di uraiikan mengenai akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan Biro Pengadaan Brang/ Jasa SETDA Provinsi NTT dan akuntabilitas keuangannya.

Dalam akuntabilitas keuangan diungkapkan mengenai target dan realisasi anggaran tahun 2020 dan selanjutnya atas belanja langsung dirinci target dan realisasi keuangannya.

A. Akuntabitias Kinerja Biro Pengadaan Barang/JasaSETDA Provinsi NTT

Dalam sub bab akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT di uraikan mengenai hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasinya.

B. Akuntabitias Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2020 beserta rincian belanja per kegiatan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi

RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT Tahun 2018-2023 memuat beberapa hal substantif sebagai berikut :

1. Visi.

Visi Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Visi Kepala Daerah. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

"NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

2. Misi

Misi adalah serangkaian aksi/tugas yang diemban sebagai penjabaran visi untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan. Misi Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Misi Kepala Daerah sesuai tugas dan Fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berangkat dari visi Kepala Daerah, dijabarkan dalam Misi Pembangunan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil;**
2. **Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*Ring of Beauty*);**
3. **Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan;**
4. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;**
5. **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.**

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka visi dan misi berhubungan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT adalah pada Misi ke 5 (lima) yaitu : **"Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik".**

Apabila misi ke 5 tersebut diturunkan ke dalam Tujuan RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang berhubungan dengan pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT adalah "***Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Korupsi (KKN)***".

Berdasarkan tujuan tersebut, Sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang terkait dengan pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT adalah "***Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif***".

Mempelajari tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka arah tujuan pembangunan di bidang pengadaan barang/jasa oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Peningkatan birokrasi yang profesional, integritas, kinerja tinggi bebas dan bersih KKN;
2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku/pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang professional, integritas, kinerja tinggi dan bebas KKN;
3. Peningkatan efisiensi, efektifitas, kualitas, transparansi proses pengadaan barang/jasa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

3.1. Tujuan :

1. Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku dan pengelola pengadaan barang/jasa;
3. Menciptakan pelayanan publik bidang pengadaan barang/jasa terintegrasi, efisien, efektif, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

3.2. Sasaran :

Mengacu pada tujuan di atas, maka ditetapkanlah sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah paket pengadaan barang/jasa di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola pengadaan barang/jasa.
3) Terselenggara pengendalian dan monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APBN Tahun 2020

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Rencana Kerja Tahunan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT Tahun 2020 dibuat dan disusun dengan mengacu pada sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT yang telah ditetapkan sebagaimana yang terdapat pada tabel Rencana Kinerja Tahunan 2020 Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT.

Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengadaan Barang/ Jasa SETDA Provinsi NTT Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2020 dan sebagai bahan usulan dalam penyusunan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan seluruh Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Berikut terdapat sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja serta target yang diharapkan dapat direalisasikan di tahun 2020.

Tabel 1

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

No	Sasaran Strategis /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksana Proses Tender Paket Strategis	% jumlah paket selesai tender	100 %
2	Terlaksana Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)	% Pengumuman RUP 39 Perangkat Daerah	100%
3	Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja PBJ	Terselenggara kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PBJ	2 dokumen laporan
4	Terlaksana pengendalian dan monitoring pelaksanaan APBD Provinsi dan APBN	Tersedianya laporan APBD Provinsi NTT dan APBN	2 dokumen laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT.

A. Akuntabilitas Kinerja

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai acuan untuk menilai kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/*Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pengukuran Kinerja

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

   a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala Pengukuran Ordinal

No.	Skala Ordinal	Kesimpulan
1.	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
2.	$70\% \leq X < 85\%$	Berhasil
3.	$55\% < X < 70\%$	Cukup Berhasil
4.	$X \leq 55\%$	Belum Berhasil

Terkait dengan kedudukan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT sebagai institusi unsur staf yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan maka Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT telah membawa manfaat bagi Pemerintah maupun *stakeholders* lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT.

Pengukuran kinerja Biro Pengadaan Barang/ Jasa SETDA Provinsi NTT Tahun 2020 disusun berdasarkan sasaran pada Rencana Kinerja Tahun 220 yang terdiri dari 4 sasaran strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT tahun 2020, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Terlaksana Proses Tender Paket Strategis.**

   Jumlah paket strategis bersumber dari APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

   Jumlah Paket Strategis :

No	Perangkat Daerah	Jumlah Paket	Pagu
1	Dinas PUPR	279	1,011,295,026,087
2	Dinas Peternakan	17	6,415,756,250
3	Dinas LHK	16	22,812,765,000
4	Dinas Kesehatan	36	58,074,386,535
5	Badan PENDA	1	2,640,000,000
6	Dinas Pendidikan	14	13,856,118,000
7	Dinas ESDM	10	5,034,500,000
8	Dinas Pertanian & KP	14	20,474,657,000
9	Badan PSDM	20	26,315,380,000
10	Dinas Sosial	2	1,726,800,000
11	Dinas Pemuda & Olahraga	5	3,060,291,000
12	Sekretariat DPRD	1	370,300,000
13	Dinas ARSIPUS	3	1,451,200,000
14	Dinas Perhubungan	12	7,109,767,200
15	Dinas KOMINFO	0	0
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA	0	0
17	Badan KESBANGPOL	0	0
18	Dinas KOP & NAKERTRANS	5	4,384,000,000
19	RSUD W.Z. Yohanes	8	894,400,000
20	Dinas Kelautan & Perikanan	10	18,420,680,000
21	SATPOL PP	1	224,000,000
22	Badan Penghubung di Jakarta	0	0
23	Dinas Pariwisata & EKRAF	3	2,581,559,000
24	BKD	1	330,000,000
25	BAPPELITBANGDA	1	210,300,000
26	Biro Hukum	0	0
27	Biro Organisasi	0	0
28	Biro PBJ	0	0
29	Badan Keuangan Daerah	0	0
30	Biro HUMAS & Protokol	0	0

No	Perangkat Daerah	Jumlah Paket	Pagu
31	Dinas PMD	1	440,000,000
32	Dinas PMPTSP	0	0
33	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0	0
34	Biro Pemerintahan	0	0
35	Inspektorat	2	10,895,500,000
36	Dinas PERINDAG	0	0
37	Biro Ekonomi	0	0
38	Biro Umum	1	3,900,000,000
39	BPBD	1	351,470,000
TOTAL		464	1,223,268,856,072

Sumber : Biro PBJ SETDA Provinsi NTT – Tahun 2020

Realisasi Tender :

Realisasi/Jumlah paket strategis selesai proses TENDER melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagai berikut :

TENDER PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2020			
A. APBD (DANA DAK)			
1	Konstruksi	120	842,923,847,252
2	Barang	51	112,108,954,821
3	Konsultansi	96	53,206,851,900
4	Jasa Lain	13	19,480,794,900
Jumlah APBD		**280**	**1,027,720,448,873**
B. APBN			
1	Konstruksi	1	1,452,000,000
2	Barang	49	31,704,729,000
3	Konsultansi	0	-
4	Jasa Lain	1	1,119,600,000
Jumlah APBN		**51**	**34,276,329,000**
TOTAL A + B		331	1,061,996,777,873

Sumber : Biro PBJ SETDA Provinsi NTT – Tahun 2020

Memperhatikan data sebagaimana tabel tersebut diatas maka capaian kinerja untuk sasaran Terlaksana Proses Tender Paket Strategis mencapai berdasarkan jumlah paket mencapai : 71.33 %, dengan perhitungan :

$$71.33\ \% = \frac{331}{464} \times 100\%$$

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan Nilai Anggaran mencapai : 86.81 % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$86.81\ \% = \frac{1.061.996.777.873}{1.223.268.856.072} \times 100\%$$

Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksana Proses Tender Paket Strategis di nilai **BERHASIL** karena persentase mencapai diatas 71% s/d 85%.

Sedangkan realisasi Indikator Kunci Kinerja (IKK) Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi mencapai 91.83%
2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif mencapai 83.55%
3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan mencapai 52.17%

Pencapaian realisasi IKK sebagai berikut :

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8
1	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	90 paket X 100% / 98 paket	91.83%	Jumlah Kontrak Konstruksi : 98 Paket Jumlah paket 2020 dibawa ke tahun 2021 : 8 Paket
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	965 paket X 100% / 1.155 paket	83.55%	Jumlah : 2.120 paket Tender Kompetitif : 965 paket Tanpa Kompetitif : 1.155 paket
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rp. 1.314.318.565.606.- X 100% / Rp. 2.519.096.426.079.-	52.17%	Nilai BL melalui Pengadaan : Rp. 1.302.288.446.326.- Nilai BL : Rp. 2.519.096.426.079.-

Sumber : Biro PBJ SETDA Provinsi NTT – 2020

2. Terlaksana Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Rencana Umum Pengadaan keadaan Maret 2020 dapat digambarkan pada table sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	PAGU Belanja Langsung	Data RUP				Jumlah Paket	Jumlah PAGU SiRUP (Input)	Prosentase Input RUP (%)
			Penyedia		Swakelola				
			Paket	Pagu	Keg./Paket	Pagu			
1	KESBANGPOL	4,205,834,000	25	449,000,000	23	3,756,000,000	48	4,205,000,000	99.98
2	Dinas LHK	54,263,311,000	214	29,992,000,000	25	24,270,000,000	239	54,262,000,000	100.00
3	Biro PBJ	6,201,754,000	8	605,000,000	20	5,596,000,000	28	6,201,000,000	99.99
4	Inspektorat	29,954,362,050	17	11,421,000,000	27	18,533,000,000	44	29,954,000,000	100.00
5	RSU. WZ. Yohannes	138,556,177,028	21	16,545,000,000	25	122,011,000,000	46	138,556,000,000	100.00
6	Dinas Kelautan & Perikanan	53,421,750,500	94	39,364,000,000	70	11,052,000,000	164	50,416,000,000	94.37
7	Biro Umum	76,011,105,671	65	15,578,000,000	53	63,583,000,000	118	79,161,000,000	104.14
8	BAPPELITBANGDA	16,527,017,600	9	755,000,000	58	4,424,000,000	67	5,179,000,000	31.34
9	Dinas PUPR	1,046,420,444,296	297	997,435,000,000	8	1,100,000,000	305	998,535,000,000	95.42
10	Biro Organisasi	5,004,751,000	8	131,000,000	18	4,873,000,000	26	5,004,000,000	99.98
11	SATPOL PP	4,751,919,520	13	365,000,000	24	4,386,000,000	37	4,751,000,000	99.98
12	Dinas ESDM	22,105,721,700	101	13,043,000,000	-	-	101	13,043,000,000	59.00
13	Dinas Perhubungan	16,497,679,000	46	8,343,000,000	20	2,678,000,000	66	11,021,000,000	66.80
14	Dinas Kesehatan	249,916,099,662	208	128,561,000,000	509	119,140,000,000	717	247,701,000,000	99.11
15	Dinas Pemuda & Olahraga	14,633,187,640	52	4,950,000,000	73	10,860,000,000	125	15,810,000,000	108.04
16	Badan Pendapatan & Aset Daerah	75,003,345,900	212	33,388,000,000	30	41,525,000,000	242	74,913,000,000	99.88
17	Badan PSDM	73,290,721,000	84	34,645,000,000	-	-	84	34,645,000,000	47.27
18	Dinas Peternakan	34,407,915,000	219	20,796,000,000	26	16,287,000,000	245	37,083,000,000	107.77
19	Badan Kepegawaian Daerah	17,751,987,200	9	664,000,000	27	17,087,000,000	36	17,751,000,000	99.99
20	BPBD	4,482,414,000	3	692,000,000	20	1,282,000,000	23	1,974,000,000	44.04
21	Biro Pemerintahan	6,301,336,000	5	505,000,000	82	5,292,000,000	88	6,297,000,000	99.93
22	Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu	4,304,551,000	6	490,000,000	17	1,960,000,000	23	2,450,000,000	56.92
23	Badan Keuangan Daerah	41,163,765,000	29	12,466,000,000	23	29,422,000,000	52	41,888,000,000	101.76
24	Dinas Pertanian & KP	51,404,569,100	523	138,329,000,000	34	10,129,000,000	557	148,458,000,000	288.80
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA	4,822,066,200	27	336,000,000	22	4,485,000,000	49	4,821,000,000	99.98
26	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	829,959,625,884	186	245,962,000,000	25	583,461,000,000	211	829,423,000,000	99.94
27	Biro HUMAS & Protokol	5,178,266,000	6	142,000,000	19	5,035,000,000	25	5,177,000,000	99.98
28	Dinas Pariwisata & EKRAF	47,773,346,000	37	14,389,000,000	25	33,383,000,000	62	47,772,000,000	100.00
29	Dinas KOMINFO	5,728,739,281	34	1,728,000,000	26	3,981,000,000	60	5,709,000,000	99.66
30	Dinas Koperasi & NAKERTRANS	22,987,207,476	42	8,056,000,000	28	17,574,000,000	70	25,630,000,000	111.50
31	Biro Ekonomi & Kerjasama	3,604,184,900	1	72,000,000	19	3,532,000,000	20	3,604,000,000	99.99
32	Dinas PMD	41,024,142,200	6	798,000,000	27	40,225,000,000	33	41,023,000,000	100.00
33	Biro Hukum	3,375,682,000	8	101,000,000	17	3,124,000,000	25	3,225,000,000	95.54
34	Dinas Sosial	24,308,395,260	71	4,459,000,000	23	22,003,000,000	94	26,462,000,000	108.86
35	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	7,666,706,670	27	2,571,000,000	25	5,007,000,000	52	7,578,000,000	98.84
36	Badan Penghubung	8,853,213,360	11	2,020,000,000	22	6,832,000,000	33	8,852,000,000	99.99
37	Dinas PERINDAG	13,677,769,000	36	3,767,000,000	26	9,910,000,000	62	13,677,000,000	99.99
38	Sekretariat DPRD	91,350,109,100	58	3,259,000,000	99	88,090,000,000	157	91,349,000,000	100.00
38	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4,507,773,800	5	137,000,000	25	4,370,000,000	30	4,507,000,000	99.98
JUMLAH		**3,161,398,945,998**	**2,823**	**1,797,309,000,000**	**1,640**	**1,350,258,000,000**	**4,464**	**3,148,067,000,000**	**99.58**

Sumber : Biro PBJ SETDA Provinsi NTT - 2020

Capaian persentase sasaran Terlaksana Pengumuman RUP mencapai 99.58% dapat dinilai SANGAT BERHASIL berdasarkan skala pengukuran Ordinal.

3. **Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJ**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan PBJ. Pelaksanaan fungsi MONEV dimaksud di laksanakan pada Program Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan PBJ Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.001.624.00.- dan Kegiatan Pengelolaan PBJ senilai 3.329.840.657.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja sebagai berikut :

1. Tahun 2020, Realisasi proses Pengadaan barang/jasa melalui tender dan atau seleksi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan sebanyak 280 paket sumber dana APBD dan APBD-Perubahan senilai Rp. 1.027.720.448.873,00 (*Satu Triliun Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga RupiahI*) dan 51 paket sumber dana APBN senilai Rp. 34.276.329.000,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
2. Tahun 2020, POKJA Pemilihan melakukan pembuktian lapangan (tahap pemilihan penyedia) sebanyak 25 paket atau 8,92 % dari total paket PBJ sumber dana APBD dan APBD-Perubahan untuk mengecek paket pekerjaan yang dibiayai dari APBD dan APBD-Perubahan.
3. Tahun 2020, Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa melakukan monitoring pasca pemilihan sebanyak 20 paket atau 7,14 % dari total paket PBJ sumber dana APBD dan APBD-P.

4. **Terlaksana pengendalian dan monitoring pelaksanaan APBD Provinsi.**

Merujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu tugas pokok yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT (selanjutnya disebut Biro PBJ) adalah melakukan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan.

Tindak lanjut terhadap tugas pokok tersebut Biro PBJ melakukan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan APBD yaitu realisasi keuangan belanja langsung dan proses pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT. Pada tataran ini, evaluasi dan penilaian kinerja hanya difokuskan pada realisasi anggaran dan tahapan pengadaan barang/jasa yaitu Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sudah tayang pada website SiRUP LKPP, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of* Reference (TOR), Proses pengadaan pada POKJA Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)/Kontrak, Proses Pekerjaan dan Serah Terima Barang.

Untuk memudahkan proses penilaian atas kinerja OPD maka dibuat indikator, bobot dan interprestasi nilai atas kinerja keuangan dan pengadaan barang/jasa :

a. Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja

Tabel Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja

Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot (%)
Kinerja Keuangan	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	40
Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	5
	Kerangka Acuan Kinerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR)	5
	Pejabat Pengadaan (PP)/Pokja Pemilihan	20
	SPPBJ/Kontrak	5
	Proses Pekerjaan	20
	Serah Terima Hasil Pekerjaan	5
	Total	100

1. Realisasi Anggaran Belanja Langsung adalah indikator penilaian kinerja keuangan sampai dengan bulan pelaporan dengan bobot penilaian sebesar 40%
2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah indikator penilaian atas tahapan pengadaan barang/jasa (PBJ) yaitu paket pengadaan melalui penyedia yang tayang pada SiRUP LKPP. Bobot penilaian sebesar 5%.
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) adalah indikator penilaian atas tahapan PBJ terhadap paket-paket pengadaan melalui penyedia. Pembototan sebesar 5% jika semua paket sudah dibuatkan KAK/TOR.

4. Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan adalah indikator penilaian atas tahapan PBJ dimana proses Pengadaan sedang dilaksanakan oleh PP/Pokja Pemilihan dengan bobot 20%.
5. SPPBJ/Kontrak adalah indikator penilaian atas tahapan PBJ terhadap paket-paket pengadaan melalui penyedia yang sudah SPPBJ/sudah penandatanganan kontrak dengan bobot 5%
6. Proses Pekerjaan adalah indikator penlaian atas tahapan PBJ terhadap paket-paket pengadaan melalui penyedia yang sedang dalam proses pekerjaan dengan bobot 20%.
7. Serah Terima Pekerjaan adalah indikator penilaian atas tahapan PBJ terhadap paket-paket pengadaan yang sudah serah terima atau sudah selesai proses pekerjaan dengan bobot 5%.

b. Interpretasi Penilaian Kinerja

Tabel Interpretasi Kinerja

Nilai (%)	Interpretasi Kinerja
>90 - 100	Sangat Baik
>80 - 90	Baik
>60 - 80	Cukup
>50 - 60	Kurang
≤50	Sangat Kurang

Hasil pengukuran sasaran pengendalian dan MONEV APBD sebagai berikut :

1. Secara umum capaian kinerja 39 OPD dalam pelaksanaan program/kegiatan, penyerapan dan pengadaan barang/jasa dalam rentang penilaian baik dengan rentang Nilai 80.66 s/d 99.59 dengan interprestasi Baik dan Sangat Baik.
2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati peringkat tertinggi dengan bobot nilai 99.59 / Sangat Baik.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT menempati peringkat bawah dengan bobot nilai 80.66 / Baik.
4. Secara keseluruhan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Nilai	Interpretasi Nilai
1	Badan Pengelola Perbatasan	99,59	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	99,55	Sangat Baik
3	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	99,44	Sangat Baik
4	Biro Organisasi	99,22	Sangat Baik
5	Dinas Perhubungan	99,22	Sangat Baik
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	99,19	Sangat Baik
7	Badan Keuangan Daerah	98,60	Sangat Baik
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	98,50	Sangat Baik
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98,47	Sangat Baik
10	Dinas Peternakan	98,36	Sangat Baik
11	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98,24	Sangat Baik
12	Satuan Polisi Pamong Praja	98,00	Sangat Baik
13	Biro Hukum	97,81	Sangat Baik
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97,74	Sangat Baik
15	Dinas Sosial	97,35	Sangat Baik
16	Biro Ekonomi dan Kerjasama	97,35	Sangat Baik
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	96,86	Sangat Baik
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	96,82	Sangat Baik
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	96,78	Sangat Baik
20	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	96,78	Sangat Baik
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96,12	Sangat Baik
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96,05	Sangat Baik
23	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	95,97	Sangat Baik
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	95,55	Sangat Baik
25	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	95,41	Sangat Baik
26	Badan Penghubung	95,36	Sangat Baik
27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	95,11	Sangat Baik
28	Inspektorat	95,01	Sangat Baik
29	Biro Umum	95,01	Sangat Baik
30	Biro Pemerintahan	94,36	Sangat Baik
31	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	94,12	Sangat Baik
32	RSU Prof. Dr. W. Z. Johanes	94,08	Sangat Baik
33	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	93,73	Sangat Baik
34	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	93,50	Sangat Baik
35	Dinas Kesehatan	92,19	Sangat Baik
36	Badan Kepegawaian Daerah	89,91	Baik
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	89,09	Baik
38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,02	Baik
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	80,66	Baik

B. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah total anggaran dan realisasi 3 Program dan 22 Kegiatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Prov. NTT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. NTT Tahun Anggaran 2020, dengan perincian sebagai berikut :

No	Program	DPPA 2020	Realisasi s/d 31 Desember 2020	
1	Pelayanan Adm. Perkantoran	942,428,000	918,227,385	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	573,975,900	564,508,400	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,000,000	19,988,000	
4	Peningkatan Adm. Pemb dan Pelayanan PBJ Pemerintah	4,001,624,000	3,908,000,530	
Jumlah		**5,538,027,900**	**5,410,724,315**	97.70%

Sumber : Biro PBJ SETDA Provinsi NTT – TA. 2020

Realisasi Pelaksanaan 22 Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	DPPA	Realisasi s/d 31 Desember 2020
Program Pelayanan Adm. Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,696,000	1,696,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	482,500,000	482,500,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	2,400,000	1,980,750
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	186,360,000	177,706,750
5	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	5,000,000	4,944,202
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35,000,000	19,980,343
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22,000,000	21,999,700
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	3,000,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	10,000,000	10,000,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	68,000,000	67,999,940
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	71,000,000	71,000,000
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	37,000,000	36,947,700
13	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	5,472,000	5,472,000
14	Pendidikan dan Pelatihan Formal	13,000,000	13,000,000
JUMLAH		**942,428,000**	**918,227,385**
			97.43 %

No.	Program/Kegiatan	DPPA 2020	Realisasi s/d 31 Desember 2020
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	317,864,000	316,460,000
2	Pengadaan Mebeleur	160,838,900	152,775,400
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	88,848,000	88,848,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6,425,000	6,425,000
JUMLAH		**573,975,900**	**564,508,400**
		98.35 %	

No.	Program/Kegiatan	DPPA 2020	Realisasi s/d 31 Desember 2020
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,000,000	3,000,000
JUMLAH		**20,000,000**	**19,988,000**
		99.94 %	

No.	Program/Kegiatan	DPPA 2020	Realisasi s/d 31 Desember 2020
PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH			
1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	3,329,840,657	3,257,576,210
2	Pengelolaaan LPSE	354,882,543	334,227,500
3	Pembinaan Advokasi PBJ dan Adm. Pembangunan	316,900,800	316,196,820
JUMLAH		**4,001,624,000**	**3,908,000,530**
		97.66 %	

Sumber : Biro PBJ SETDA Provinsi NTT - 2020

Berdasarkan tabel realisasi keuangan sebagaimana tersebut diatas pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut :

1. Program Pelayaan Administrasi Perkantoran mencapai 97.43%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencapai 98.35 %
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mencapai 99.94%.
4. Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan PBJ Pemerintah mencapai 97.66%

Dengan demikian rata-rata persentase pencapaian program mencapai **97.70%**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT. Media ini juga sangat penting sebagai masukan dan umpan balik dalam pengambilan keputusan selanjutnya bagi pihak-pihak terkait. Kebijaksanaan yang akan diterapkan selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT telah berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan melalui pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan prinsip efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, transparan, akuntabel dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik dan keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Dengan mengingat bahwa akuntabilitas kinerja ini perlu dievaluasi sebagai kerangka pertanggungjawaban maka perlu disusun dalam suatu bentuk laporan yang dibuat secara periodik sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

Akhir kata, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu serta atas kerjasamanya dalam penyelesaian LKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020.

Kupang, Desember 2020

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA PROVINSI NTT,

SIPRIANUS K. KELEN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19631119 989031009

LAMPIRAN LAMPIRAN

REKAPITULASI PAKET TENDER APBD TAHUN 2020

No	Perangkat Daerah	Jumlah Paket	Pagu	Keterangan
1	Dinas PUPR	279	1,011,295,026,087	
2	Dinas Peternakan	17	6,415,756,250	
3	Dinas LHK	16	22,812,765,000	
4	Dinas Kesehatan	36	58,074,386,535	
5	Badan PENDA	1	2,640,000,000	
6	Dinas Pendidikan	14	13,856,118,000	
7	Dinas ESDM	10	5,034,500,000	
8	Dinas Pertanian & KP	14	20,474,657,000	
9	Badan PSDM	20	26,315,380,000	
10	Dinas Sosial	2	1,726,800,000	
11	Dinas Pemuda & Olahraga	5	3,060,291,000	
12	Sekretariat DPRD	1	370,300,000	
13	Dinas ARSIPUS	3	1,451,200,000	
14	Dinas Perhubungan	12	7,109,767,200	
15	Dinas KOMINFO	0	0	
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA	0	0	
17	Badan KESBANGPOL	0	0	
18	Dinas KOP & NAKERTRANS	5	4,384,000,000	
19	RSUD W.Z. Yohanes	8	894,400,000	
20	Dinas Kelautan & Perikanan	10	18,420,680,000	
21	SATPOL PP	1	224,000,000	
22	Badan Penghubung di Jakarta	0	0	
23	Dinas Pariwisata & EKRAF	3	2,581,559,000	
24	BKD	1	330,000,000	
25	BAPPELITBANGDA	1	210,300,000	
26	Biro Hukum	0	0	
27	Biro Organisasi	0	0	
28	Biro PBJ	0	0	
29	Badan Keuangan Daerah	0	0	
30	Biro HUMAS & Protokol	0	0	
31	Dinas PMD	1	440,000,000	
32	Dinas PMPTSP	0	0	
33	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0	0	
34	Biro Pemerintahan	0	0	
35	Inspektorat	2	10,895,500,000	
36	Dinas PERINDAG	0	0	
37	Biro Ekonomi	0	0	
38	Biro Umum	1	3,900,000,000	
39	BPBD	1	351,470,000	
TOTAL		464	1,223,268,856,072	

Sumber : RUP Tahun 2020

Kupang, 30 Desember 2020

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur

SIPRIANUS K. KELEN., S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196311191989031009

DATA PAKET PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2020
SUMBER DANA APBD, APBD-P DAN APBN

1 DATA PAKET STRATEGIS TAHUN 2020 SUMBER DANA APBD dan APBD-P (DAK DAN DAU)

TARGET PAKET PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2020				PAKET PENGADAAN BARANG/JASA YANG DISERAHKAN DAN DIPROSES DI BIRO PBJ TAHUN ANGGARAN 2020 (Mekanisme Tender dan atau Penunjukan Langsung)		REALISASI PAKET STRATEGIS TAHUN 2020 YANG DI PROSES PADA BIRO PBJ							
						Selesai Proses PBJ (mekanisme Tender)		Selesai Proses PBJ (mekanisme Penunjukan Langsung)		Selesai Proses PBJ (Gagal Tender)		PAKET STRATEGIS YANG TELAH DIKIRIM KE BIRO PBJ, ANGGARAN DI RASIONALISASI	
						Jumlah Paket	Efisiensi (Pagu Anggaran - Harga Penawaran Terkoreksi)	Jumlah Paket	Efisiensi (Pagu Anggaran - Harga Penawaran Terkoreksi)	Jumlah Paket	Pagu Anggaran	Jumlah Paket	Pagu Anggaran
a				b		c						d	
A. APBD (DANA DAU dan DAK)													
1	Konstruksi	120	842,923,847,252	120	842,923,847,252	97	30,291,647,204	1	95,900,000	-	-	22	117,795,559,609
2	Barang	49	103,697,943,216	49	103,697,943,216	38	7,911,490,718	8	325,370,350	1	2,000,000,000	2	1,543,824,000
3	Konsultansi	92	48,258,291,900	92	48,258,291,900	86	2,549,308,204	-	-	-	-	6	2,215,000,000
4	Jasa Lain	12	12,586,794,900	12	12,586,794,900	6	2,551,693,900	4	37,019,600	-	-	2	470,000,000
Total Paket (APBD)		**273**	**1,007,466,877,268**	**273**	**1,007,466,877,268**	**227**	**43,304,140,026**	**13**	**458,289,950**	**1**	**2,000,000,000**	**32**	**122,024,383,609**
B. APBD-P (DANA DAU)													
1	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Barang	2	8,411,011,605	2	8,411,011,605	1	15,851,605	1	24,660,000	-	-	-	-
3	Konsultansi	4	4,948,560,000	4	4,948,560,000	2	55,686,090	-	-	2	4,300,000,000	-	-
4	Jasa Lain	1	6,894,000,000	1	6,894,000,000	1	102,220,000	-	-	-	-	-	-
Total Paket (APBD-P)		**7**	**20,253,571,605**	**7**	**20,253,571,605**	**4**	**173,757,695**	**1**	**24,660,000**	**2**	**4,300,000,000**	**-**	**-**
	Total (A + B)	**280**	**1,027,720,448,873**	**280**	**1,027,720,448,873**	**231**	**43,477,897,721**	**14**	**482,949,950**	**3**	**6,300,000,000**	**32**	**122,024,383,609**

Catatan :
Sumber data : DPA 39 PD TA.2020

Kupang, 30 Desember 2020

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG / JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SIPRIANUS K. KELEN., S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196311191989031009

2 DATA PAKET STRATEGIS TAHUN 2020 SUMBER DANA APBN

TARGET PAKET PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2020				PAKET PENGADAAN BARANG/JASA YANG DISERAHKAN DAN DIPROSES DI BIRO PBJ TAHUN ANGGARAN 2020 (Mekanisme Tender dan atau Penunjukan Langsung)		REALISASI PAKET STRATEGIS TAHUN 2020 YANG DI PROSES PADA BIRO PBJ						PAKET STRATEGIS YANG TELAH DIKIRIM KE BIRO PBJ, ANGGARAN DI RASIONALISASI	
						Selesai Proses PBJ (mekanisme Tender)		Selesai Proses PBJ (mekanisme Penunjukan Langsung)		Selesai Proses PBJ (Gagal Tender)			
						Jumlah Paket	Efisiensi (Pagu Anggaran - Harga Penawaran Terkoreksi)	Jumlah Paket	Efisiensi (Pagu Anggaran - Harga Penawaran Terkoreksi)	Jml Paket	Pagu Anggaran	Jml Paket	Pagu Anggaran
a				b		c						d	
APBN													
1	Konstruksi	1	1,452,000,000	1	1,452,000,000	1	171,801,212	-	-	-	-	-	-
2	Barang	49	31,704,729,000	49	32,019,129,000	31	1,518,289,999	11	104,832,500	-	-	7	1,872,829,000
3	Konsultansi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jasa Lain	1	1,119,600,000	1	1,119,600,000	1	56,000,000	-	-	-	-	-	-
Total Paket (APBN)		**51**	**34,276,329,000**	**51**	**34,590,729,000**	**33**	**1,746,091,211**	**11**	**104,832,500**	-	-	**7**	**1,872,829,000**

Kupang, 30 Desember 2020

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG / JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SIPRIANUS K. KELEN., S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196311191989031009